



KOMPETENSI APARATUR DESA, KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Wakhidian Solehatur Rohmah, Ardyan Firdausi Mustoffa, Nurul Hidayah
Universitas Muhammadiyah, Ponorogo

Info Artikel

Abstract

Sejarah Artikel:

Diterima:
01 September 2022

Disetujui:
05 September 2022

Keywords: Village Apparatus Competence, Organizational Commitment, Community Participation, Implementation of Information Technology Systems, Accountability of Village Fund Allocation Management

This research has an impact on the ability of village officials, organizational commitment, community participation, and the use of information technology systems on village government accountability in managing village village funds in all Genangan sub-districts. This survey uses primary data from questionnaires distributed to 15 villages in the Genangoan District, Ponorogo Regency. For data analysis, we used multiple regression analysis. Based on the results of the first hypothesis study, there is a positive influence between the capacity of village officials and the accountability of village resource allocation management. The results of testing the second hypothesis have a positive effect on organizational involvement and accountability of village fund allocation. The results of the third research hypothesis indicate that community participation has a positive effect on accountability in the management of village funds. The results of the fourth research hypothesis indicate that there is a positive effect of using IMS on accountability in the management of ADD. Meanwhile, the results of simultaneous hypothesis testing show that the capacity of village officials, organizational commitment, community participation, and the application of information technology systems together affect the accountability of resource allocation management Village.

Abstrak

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Penerapan Sistem Teknologi Informasi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan penggunaan sistem teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di desa se-Kecamatan Jenangan. "Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kusioner kepada 15 Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian hipotesis pertama terdapat pengaruh positif antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pengujian hipotesis kedua terdapat pengaruh positif antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas alokasi dana desa. Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian hipotesis keempat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan STI terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD. Sedangkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan penerapan sistem teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

✉ *Corresponding Author:*
Ardyan Firdausi Mustoffa

E-mail: ardian@umpo.ac.id

ISSN (print): 1412-3126
ISSN (online): 2655-3066

PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan desa saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam proses pemerintahan seperti pembangunan. Pemerintah daerah sendiri telah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di masing-masing daerah. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan kondisi, termasuk pengaturan keuangan, guna mencapai kepentingan umum. Penyelenggaraan sistem pemerintahan desa dirancang untuk mengatur rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa, serta sumber pendanaan pembangunan (Sapartiningsih et al., 2018).

Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Maarif, 2018) Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Alokasi Dana Desa akan berhasil apabila pengelolaannya mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan bersifat akuntabilitas (Mualifu et al., 2019). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan (Widyatama et al., 2017). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik (Kurniawati, 2021).

Menurut hasil wawancara dengan bapak Kuntohari, S.sos, M.Si selaku Kasi Pemmas yang merupakan salah satu aparatur pemerintah di Kecamatan Jenangan terkait pelaporan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kecamatan

Jenangan masih ada beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan Dana Desa karena banyak yang mengalami hambatan atau kendala dalam pelaporannya antara lain SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak memadai dan terlalu menggantungkan kepada orang yang paham saja sehingga perlu waktu lama dalam penyelesaian penyusunannya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Putri (2021) tentang Dana Desa di kecamatan Jenangan terdapat Perangkat desa masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda tentang cara menyusun laporan keuangan desa, karena beberapa perangkat desa tidak diberangkatkan untuk melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan.

Terkait Kajian Ini Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nurkhasanah (2019) menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparat, keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan uang desa. Penelitian yang dijalankan oleh Rismawati (2019) juga berpengaruh positif terhadap variabel pemerintahan desa, keterlibatan organisasi, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, serta kapasitas perangkat pengelolaan dana desa. desa dan sistem pengendalian intern untuk mempengaruhi keuangan desa. tanggung jawab. diberikan. Dari penelitian penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel ini penting untuk pengelolaan alokasi dana desa yang tepat agar pemerintahan dapat berfungsi dengan baik.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang terangkum dalam variabel-variabel yang digunakan. Variabel kompetensi perangkat desa mendayagunakan karya Mada et al. (2017) yang berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Perdana (2018) yang berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Variabel komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat menggunakan penelitian

Perdana (2018) yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan penelitian (Nurkhasanah, 2019) yang berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi dan penelitian Mudarosatun (2017) yang berpengaruh negatif terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan variabel penerapan sistem teknologi informasi menggunakan penelitian Mayowan (2016) yang berpengaruh positif dan penelitian Pahlawan et al. (2020) yang berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk penelitian terdahulu yang digunakan terdapat ketidak konsistenan hasil antara variabel x dan variabel y, hal tersebut yang mendasari bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Pemerintah desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah negara bagian dan pelaksanaannya ditargetkan pada daerah pedesaan. Pemerintahan desa merupakan suatu proses dimana upaya masyarakat desa yang terkena dampak digabungkan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Putri, 2021)

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. .

Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Alokasi Dana Desamerupakan bagiandari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan menjelaskan kinerja dan tindakan seorang kepala unit organisasi. Akuntabilitas diberikan kepada mereka yang memiliki hak untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas berupa laporan dengan prinsip bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa (Rismawati, 2019).

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya(Dewi & Gayatri, 2019).

Komitmen Organisasi

Nurdin dan Wijaya (2019) Komitmen organisasi adalah sikap atau kemauan setiap individu yang tergabung dalam suatu organisasi/instansi pemerintah dan tertarik dengan budaya, tujuan, dan sasaran organisasi yang masih diinginkan individu tersebut. Dengan kata lain, Anda dapat bertahan dalam organisasi/institusi Anda untuk mencapai dan bertahan dalam tujuan organisasi Anda.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat, karena partisipasi masyarakat tidak hanya

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan program pembangunan, tetapi juga kurangnya partisipasi masyarakat. juga terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan kemungkinan yang ada di masyarakat. Dalam semua kegiatan desa, pembangunan desa tidak tercapai dengan baik (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Penerapan Sistem Teknologi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sistem adalah sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Teknologi informasi adalah teknologi untuk memproses dan menyimpan informasi. Teknologi informasi juga digunakan sebagai teknologi komunikasi, yaitu untuk menyebarkan informasi. Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) teknologi informasi sangat membantu untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh manusia. Teknologi informasi memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Landasan teori berisi tentang penjelasan terkait dengan teori yang digunakan untuk mengelaborasi variabel/konstruk penelitian.

Pengembangan Hipotesis

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Kemampuan personel merupakan salah satu upaya minimalisasi asimetri informasi yang ada melalui biaya yang mengikat. Ketika perangkat desa memahami akuntabilitas pengelolaan uang Tidak ada desa, ketidakteraturan anggaran.

Kompetensi yang memadai dari perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah desa dalam menerapkan mekanisme kontrolnya (Supadmi & Dharma, 2018).

Dewi dan Gayatri (2019), mengemukakan bahwa semakin kompeten aparat desa di bidangnya masing-masing, semakin besar kepercayaan antara

masyarakat dan pemerintah dalam mengalokasikan dana desa. Sementara itu, Widyatama et al. (2017) menemukan bahwa kapabilitas perangkat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD.

H1: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.

Aparatur yang baik juga memiliki komitmen organisasi yang baik dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tingginya komitmen organisasi pemerintah desa mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab (Rismawati, 2019).

Tanggung jawab pengelolaan dana desa diwujudkan dengan komitmen organisasi yang baik dari pemerintah desa, sebagai perangkat yang terdapat dalam organisasi atau lembaga tersebut ikut serta bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan memiliki rasa kepuasan hidup. selesai. Tujuan organisasi dan koordinasi peralatan dapat dicapai dengan komitmen organisasi yang tinggi (Perdana, 2018). Didukung oleh Suherwan dan Kamaliah (2017) mengemukakan bahwa keterlibatan organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2: Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencapai desa yang dapat memenuhi kebutuhan desa itu sendiri. Akuntabilitas juga dapat ditingkatkan melalui keterlibatan masyarakat. Keputusan pejabat pemerintah perlu melibatkan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dan menyatakan perlu terlibat langsung

dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan (Rismawati, 2019). Menurut Dewi dan Gayatri (2019) keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Mengingat pengelolaan dana desa yang rawan penipuan secara cermat, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari peran serta aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat. Didukung oleh penelitian Perdana (2018) yang menyatakan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta dalam menyelenggarakan pengelolaan Dana Desa yang lebih baik. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya.

H3: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Komputer sendiri di gunakan sebagai alat bantu kerja para aparatur desa dalam proses penyusunan laporan keuangan pada pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana Desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat (Putri, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan kas desa. Artinya, semakin efektif teknologi informasi yang digunakan, maka pengelolaan dana desa akan semakin bertanggung jawab. Memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat

dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencapai pengelolaan desa yang baik, memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat dan akurat (Perdana, 2018)

H4: Penerapan Sistem Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas desa menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang disampaikan melalui pelaporan keuangan publik kepada pihak-pihak yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Sesuai dengan penelitian Rismawati (2019) yang menyatakan komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan penggunaan sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, kemampuan perangkat desa, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat dan sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Perdana, 2018).

H5: Tingkat Pendidikan, Komitmen Organisasi Dan Sistem Teknologi Informasi Berpengaruh Positif secara simultan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu Metode untuk menganalisis dan meneliti suatu populasi dengan menggunakan analisis data bersifat angka (Sugiyono, 2017). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diambil dari kumpulan hasil survei yang dibagikan kepada responden.

Populasi yang akan diuji pada penelitian ini adalah seluruh aparatur

desa di Kecamatan Jenangan dan sampel yang digunakan yakni 75 aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara.

Kuesioner merupakan teknik menghimpun data dengan memberikan beberapa item pernyataan kepada para responden untuk mendapatkan jawaban atas pernyataan tersebut sedangkan wawancara merupakan digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2017). Bentuk kuesioner yang digunakan adalah skala likert (*likert scale*) dengan skala pengukuran 1-5.

Semua data yang terkumpul dalam survei ini akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS. Tahap pengujian penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi. Model persamaan untuk analisis diskriminan yang digunakan dalam dokumen ini adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana Y merupakan Akuntabilitas Pengelolaan ADD, a adalah konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefisien regresi, X_1 adalah Kompetensi Aparatur Desa, X_2 adalah Komitmen Organisasi, X_3 adalah Partisipasi Masyarakat, X_4 adalah Penerapan STI dan e adalah *standart error*.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis

Sebelum dilakukan analisa, kuesioner yang digunakan terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari hasil pengujian diketahui bahwa kuesioner yang

digunakan sudah valid karena nilai *P-Value* untuk variabel bebas dan variabel terikat berada pada angka $< 0,05$. Sedangkan untuk uji reliabilitas, hasil *cronbach alpha* berada pada angka 0,227 atau $> 0,70$ sehingga disimpulkan bahwa data sudah reliabel :

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

pernyataan	Nilai sig.2 (Tailed)	Kriteria
X1	0,000	Valid
X2	0,000	Valid
X3	0,000	Valid
X4	0,000	Valid
Y	0,000	Valid

Sumber : data diolah, 2022

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,923	Reliabel
X2	0,919	Reliabel
X3	0,927	Reliabel
X4	0,935	Reliabel
Y	0,938	Reliabel

Sumber: data diolah, 2022

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data dari sampel layak digunakan atau tidak. Apabila terjadi masalah saat pengujian maka data harus diperbaiki terlebih dahulu sampai data layak untuk penelitian. Penelitian ini berupa uji normalitas, uji heteroskedasitas dan uji multikolonearitas sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	.081 ^c
------------------------	-------------------

Sumber : data diolah, 2022

Data berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2 Tailed) berada pada nilai 0,81 $> 0,05$.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolonieritas

Kompetensi Aparatur Desa	.732	1.367
Komitmen Organisasi	.985	1.015
Partisipasi Masyarakat	.755	1.324
Penerapan STI	.756	1.323

Sumber : data diolah, 2022

Data tidak terjadi gejala Multikolonieritas karena nilai tolerance semua variabel $> 0,10$ dan nilai VIF semua variabel < 10 .

Tabel 5 Hasil Uji heterokedastisitas

Kompetensi Aparatur Desa	.844
Komitmen Organisasi	.720
Partisipasi Masyarakat	.901
Penerapan STI	.586

Sumber : data diolah, 2022

Tabel 6 Hasil Uji T

Variabel	t	Sig
X1	3.482	.001
X2	2.376	.020
X3	3.480	.001
X4	4.101	.000

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Komitmen Organisasi memiliki nilai signifikansi $0,020 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
3. Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
4. Penerapan Sistem Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Penerapan Sistem Teknologi

Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Tabel 7 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.
1	.783 ^a	.612	.590	2.223

Sumber : data diolah, 2022

Besarnya nilai R Square atau besarnya pengaruh dari kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan penerapan sistem teknologi informasi secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah sebesar 0,612 atau 61,2% dan selebihnya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Semakin tinggi kualitas kompetensi aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo juga akan meningkat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kompeten aparatur desa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditentukan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dengan memberikan pembagian-pembagian tugas dan wewenang antar setiap bagian yang ada serta pemberian wewenang dan dokumen-dokumen yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan setiap prosedur dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mada et al. (2017) menyatakan kompetensi aparat

pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparatur pengelola Dana Desa maka pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel. Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam bidangnya maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat serta pemerintah terhadap pengalokasian Dana Desa.

Semakin tinggi komitmen organisasi aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo juga akan meningkat. Hal ini terjadi Karena aparatur pemerintah desa akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui pemenuhan kewajibannya dalam mengelola alokasi dana desa sehingga segala bentuk kegiatan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban bersifat akuntabel. Berdasarkan hasil tersebut, perangkat desa dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi dapat menyimpulkan: Rasa kepedulian terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memiliki loyalitas dan loyalitas, membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam organisasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi menjadi variabel yang paling sedikit pengaruhnya dibanding dengan variabel lainnya. Berdasarkan penelitian Perdana (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi menjadi salah satu keberhasilan pengelolaan keuangan, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada elemen terkecil dari pemerintahan. Mada et al. (2017) yang menyatakan

bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo juga akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat seperti terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program penggunaan dana desa, mengusulkan rencana alternatif kepada BPD, terlibat secara aktif dalam rapat paripurna penetapan dan pembahasan anggaran desa, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran desa dan segala aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan alokasi dana desa dengan baik dan benar, namun juga terdapat beberapa masyarakat yang enggan tahu terkait masalah dana desa, beberapa dari masyarakat hanya melihat tanpa ikut berkontribusi dalam pemberian ide dan lain-lain. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan mengingat adanya dana desa dan tujuan pengalokasian dana desa. Oleh karena itu, pentingnya pelibatan masyarakat diakui sebagai upaya mempersiapkan masyarakat yang lebih mandiri. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Perdana (2018) yang menyatakan pengelolaan Dana

Desa yang dilakukan oleh aparat ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta dalam menyelenggarakan pengelolaan Dana Desa yang lebih baik. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya.

Penerapan Sistem Teknologi Informasi memiliki hubungan baik dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan pemerintah desa berinteraksi dengan masyarakat lebih sering. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi merupakan hal yang perlu dilakukan karena dapat teknologi memiliki manfaat dan memberikan kemudahan dalam meringankan dan membantu tugas yang dilakukan agar lebih efisien. Hasil penelitian ini didukung oleh Aulia (2018) yang mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan penerapan sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan kepercayaan masyarakat.
2. Peneliti selanjutnya perlu melakukan investigasi dalam skala yang lebih luas dan menggunakan sampel yang lebih banyak dengan memperluas target atau lokasi yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparat pemerintah desa se-kecamatan banyudono kabupaten boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten 50 kota. *Jurnal Online Mahasiswa FEB*, 1(1), 1–15.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-jurnal akuntansi*, 26, 1269.
- Kurniawati, I. (2021). *Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa gelanglor kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo*. Universitas muhammadiyah ponorogo.
- Mudarasatun, I. (2017). *Faktor-faktor yang*

- mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi pada kantor desa di kabupaten ponorogo). Universitas muhammadiyah ponorogo.
- Maarif, F. Y. (2018). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa tahun 2015 (studi kasus di desa parerejo kec. Purwodadi kab. Pasuruan)*. University Of Muhammadiyah Malang.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115.
- Mayowan, Y. (2016). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa (studi kasus di kabupaten lamongan). *Profit*, 10(01), 14–23.
- Mualifu, G, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (studi empiris pada seluruh desa di kecamatan mrebet kabupaten purbalingga). *Journal Of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai). *Accounting, Accountability, And Organization System Journal*, 1(1), 1–10.
- Nurkhasanah, I. (2019). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah magelang.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.
- Putri, A. K. , d. (2021). *Pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan jenangan kabupaten ponorogo*. Universitas muhammadiyah ponorogo.
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. Skripsi, universitas muhammadiyah magelang.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 100–114.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 3, 580–590.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherwan, & kamaliah. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi alokasi dana desa (add) (studi kasus di kecamatan siantan selatan kabupaten kepulauan anambas). *Jurnal Tepak Manajemen*

Bisnis, 9(2), 201–214.

Supadmi & Dharma. (2018). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 13(2), 132–145.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.